



Serapan Bantuan Hukum Masyarakat Miskin Sangat Tinggi

YOGYA (MERAPI) - Penyerapan anggaran bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kota Yogyakarta hampir menyentuh 100 persen pada 2025.

Kepala Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta, Rihari Wulandari, mengungkapkan bahwa tingkat penyerapan anggaran bantuan hukum bagi masyarakat miskin di tahun keempat mencapai angka optimal.

"Untuk penyerapan, per Oktober kemarin sudah 99 persen. Ini sangat luar biasa, karena dua tahun terakhir penyerapan kami juga tinggi," ujarnya dalam FGD Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Yogya, Rabu (19/11).

Rihari menjelaskan, tingginya penyerapan anggaran menunjukkan semakin meningkatnya pemahaman masyarakat bahwa pemerintah hadir memberikan perlindungan hukum kepada warga miskin. Pada tahun pertama dan kedua program ini berjalan, tingkat penyerapan hanya mencapai 51 persen, namun kini hampir 100 persen.

Tercatat sepanjang tahun anggaran 2025, sebanyak 72



MERAPI-Dok Pemkot Yogyakarta

Rihari Wulandari

kasus ditangani 24 mitra Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang bekerja sama dengan Pemkot Yogyakarta.

Di mana program bantuan hukum gratis tersebut memiliki kebijakan pengecualian perkara, sehingga tidak semua perkara bisa diajukan dalam fasilitasi ini. Antara lain tindak pidana makar, kekerasan seksual, psikotropika dan zat adiktif atau narkoba, tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia, terorisme, korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

Selain pendampingan hukum, tahun ini Pemkot Yog-

yakarta juga melaksanakan enam kali kegiatan penyuluhan nonlitigasi sebagai upaya peningkatan pemahaman hukum masyarakat.

Dalam forum tersebut Rihari juga menyampaikan adanya usulan dari DPRD Kota Yogyakarta agar bantuan hukum tidak hanya menyoal pelaku, tetapi juga saksi dan korban, terutama yang berasal dari keluarga tidak mampu.

"Saksi dan korban itu kan belum tentu mampu secara ekonomi. Kita bisa katakan masyarakat sekarang sudah paham bahwa pemerintah kota hadir untuk memberikan perlindungan hukum. Kami juga mengapresiasi mitra LBH dan OBH yang sudah hadir membantu masyarakat," imbuhnya.

Menurutnya, lima LBH dan OBH dengan serapan tertinggi di tahun 2025 di antara Yayasan AFTA mencapai Rp 46 juta untuk litigasi, LBH Tentrem Rp 42 juta litigasi dan Rp 3,7 non litigasi, LBH Sembada Rp 36 juta litigasi, LBH Harapan Rp 22 ju-

ta litigasi dan Rp 3,6 juta non litigasi, serta YPBH Peradi Bantul Rp 25 juta litigasi.

Salah satu perwakilan LBH, Lisa dari LKBH UII, menyampaikan sejumlah catatan berdasarkan pengalaman pendampingan selama setahun terakhir. Ia mencontohkan satu kasus, di mana seorang perempuan lanjut usia ditolak permohonan SK-TM-nya karena masih tercatat sebagai istri pensiunan. Padahal hak pensiun tersebut sepenuhnya telah diambil alih oleh anak-anaknya. "Secara administratif, ia masih dianggap istri pensiunan. Tetapi secara faktual, ia sudah tidak menerima hak apa pun. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan dan realitas warga rentan," tegasnya.

Lisa meminta Pemkot dan tim bantuan hukum untuk menghadirkan solusi yang lebih adaptif terhadap kondisi warga rentan, agar semangat perlindungan hukum bagi masyarakat miskin tidak terhambat oleh ketentuan administratif. (*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 19 Juni 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005